

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Beasiswa merupakan wujud bantuan dan apresiasi bagi pelajar atau mahasiswa agar dapat meningkatkan minat melanjutkan pendidikan khususnya bagi kalangan menengah ke bawah. Pendidikan adalah proses belajar sepanjang hayat yang tidak hanya membentuk intelektualitas, tetapi juga karakter dan nilai-nilai moral bagi seluruh kalangan masyarakat. Melalui pendidikan, kita dapat mencapai kesuksesan pribadi dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat (Hartati & Sabilla, 2023). Maka sangat diperlukan dukungan perencanaan pembangunan untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan program beasiswa pendidikan (Esther Dita & Legowo, 2022).

Negara berkembang seperti Indonesia harus terus melaksanakan pembangunan dalam bidang pendidikan melalui program beasiswa sebagai wujud upaya negara untuk meningkatkan pemerataan pendidikan (Adhitya et al., 2022). Sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terdapat tujuan nasional Indonesia berbunyi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam buku yang bertajuk *The End of Poverty*, Sach (2005) beropini bahwa bentuk upaya pengentasan kemiskinan meliputi kesehatan dan pendidikan (Adhitya et al., 2022). Dengan mewujudkan kemajuan pendidikan, setiap masyarakat juga mampu memutus rantai kemiskinan.

Kemiskinan adalah masalah besar yang dialami berbagai negara di dunia, khususnya Indonesia. *United Nations Development Programme* (UNDP) berpendapat bahwa kemiskinan ialah kondisi kekurangan penghasilan yang berakibat menjadi kesulitan ekonomi. Namun, gambaran lain terkait kemiskinan yaitu kondisi keterbatasan akses kesehatan atau air minum bersih, pendidikan, dan mempengaruhi manusia dalam partisipasi politik serta faktor penting lainnya. Maka terdapat dua faktor utama penyebab kemiskinan meliputi pertama, faktor alam yaitu kondisi geografis yang kurang mendukung dan keterbatasan teknologi membuat sebagian orang sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, faktor sosial yaitu sistem sosial yang tidak adil berakibat kurangnya pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi bagi sebagian masyarakat (Akhmad, 2021). Adapun data terkait jumlah penduduk miskin di Indonesia, sebagai berikut.

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024 (Diolah Oleh Penulis, 2025)

Menurut data terkait jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Maret 2024 terdapat sebanyak 25,22 juta orang penduduk yang hidup dalam keadaan miskin. Kondisi tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan bulan Maret 2023 sebanyak 0,68 juta orang. Pada bulan Maret 2023, sebanyak 25,90 juta orang penduduk yang hidup dalam keadaan miskin. Kondisi tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar 0,46 juta orang dari Bulan September 2022 sebanyak 26,36 juta orang penduduk yang hidup miskin. Pada bulan September 2022 mengalami peningkatan sebanyak 0,20 juta orang dibandingkan bulan Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin masih dikatakan cukup banyak disertai naik turunnya persentase yang cenderung kecil (Salam & Arif, 2024).

Persentase penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, laju penurunan persentase kemiskinan di perdesaan di tahun 2024 dua kali lipat dibandingkan di perkotaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan tahun 2024 sekitar 7,09 %, sedangkan terdapat sebesar 11,79 % persentase penduduk miskin di perdesaan. Kemiskinan tersebut sangat mempengaruhi tingkat pendidikan yang mengakibatkan terdapat anak tidak sekolah. Angka anak tidak sekolah menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, mayoritas berumur 16-18 tahun dengan klasifikasi yaitu pada pedesaan mencapai 24,50 %, sedangkan perkotaan lebih rendah yaitu mencapai 15,61 % (Rahmawati & Satmoko Adi, 2024). Kesimpulannya, bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia termasuk salah satu faktor yang berdampak besar dalam meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang tinggi sangat krusial

dalam meraih kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan akan membatasi potensi individu untuk berkembang dan bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif, kualifikasi pendidikan menjadi salah satu persyaratan utama (Adhitya et al., 2022).

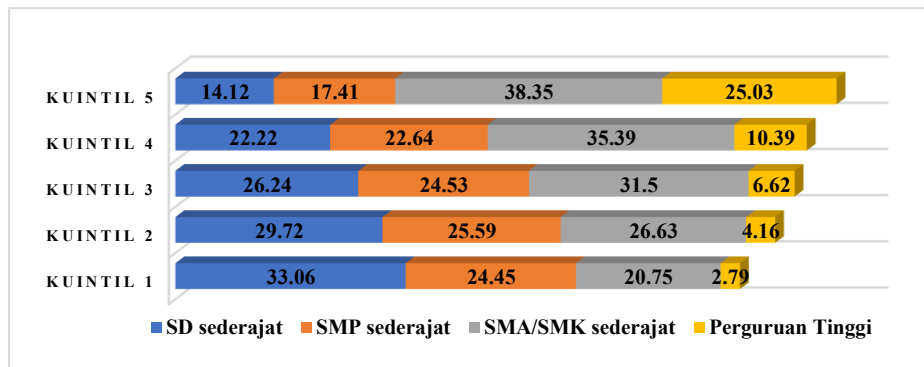
Memperoleh pendidikan ialah hak setiap warga negara sedangkan pemerintah berkewajiban sebagai penyedia dan penyelenggara pendidikan yang berkualitas bagi warga negara (Hartati & Sabilla, 2023). Sebagaimana dengan amanat konstitusi dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

"(1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."

Maka dari itu, pemerintah telah mengupayakan keterjangkauan dan pemerataan secara adil guna memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi, salah satunya melalui peran perguruan tinggi (Hasan et al., 2023).

Habibah et al. (2019) berpendapat bahwa perguruan tinggi merupakan satu di antara kunci yang berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Meskipun pendidikan ialah hal yang penting, tetapi tidak semua masyarakat Indonesia mampu menempuhnya, terlebih lagi hingga melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (Rahmanto, 2024). Menurut Pribakti (2018), menerangkan bahwa terjadinya kemiskinan berkaitan dengan ketidakmampuan masyarakat miskin guna mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Kenaikan biaya pendidikan yang signifikan tetap menjadi tantangan, meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan pendidikan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (Adhitya et al., 2022).

Gambar 1. 2 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Menurut Status Ekonomi di Indonesia Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024 (Diolah Oleh Penulis, 2025)

Menurut gambar di atas menjelaskan bahwasanya tingkat pendidikan yang ditamatkan menurut status ekonomi dengan melihat adanya setiap kuartil. Hal tersebut dimulai dari kuartil 1 artinya termiskin, kuartil 2 berarti miskin dan rentan, kuartil 3 artinya pengeluaran moderat, kuartil 4 berarti pengeluaran menengah ke atas, dan yang terakhir yaitu kuartil 5 berarti terkaya. Pada kuartil 1 yang tergolong sangat tidak mampu jenjang pendidikannya didominasi tamatan SD sederajat senilai 33,06%, terdapat selisih yang jauh dengan penduduk tamatan perguruan tinggi dengan skor terendah yaitu 2,79%. Sedangkan pada kuartil 5 yang tergolong sangat mampu jenjang pendidikannya didominasi oleh tamatan SMA/SMK sederajat senilai 38,35% dan memiliki nilai partisipasi tamatan perguruan senilai 25,03% (Salam & Arif, 2024).

Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi menurut Badan Pusat Statistik tahun 2024 memperlihatkan rendahnya kemampuan penduduk miskin dengan berpendapatan sangat rendah (kuartil 1) dalam mengakses jenjang pendidikan lebih tinggi serta adanya disparitas yang cukup tinggi antara kalangan berpendapatan sangat tinggi (kuartil 5) dalam mengakses pendidikan tinggi.

Capaian APK perguruan tinggi tahun 2024 dari penduduk usia 19–23 tahun pada kuartil 1 hanya sebesar 18,23 % lebih rendah dibanding kuartil 5 yaitu 54,25 %. Dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi sangat berpengaruh terhadap minat dan partisipasi penduduk dalam melanjutkan jenjang pendidikan. Keterbatasan ekonomi atau kemiskinan menjadi tantangan di dunia pendidikan perguruan tinggi (BPS, 2024).

Tabel 1. 1 Jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi Indonesia Di Negara Asean Pada Tahun 2024

No.	Negara	Persentase
1.	Singapura	91,09 %
2.	Thailand	42,29 %
3.	Malaysia	43,00 %
4.	Indonesia	32,00 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024 (Diolah Oleh Penulis, 2024)

Data di atas sebagai bukti bahwa tahun 2024 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi negara Indonesia sebesar 32,00% yang terjadi peningkatan sebesar 0,55 poin dibandingkan tahun 2023 sebesar 31,45%. Meskipun mengalami peningkatan, APK pendidikan tinggi negara Indonesia masih dikatakan rendah dibandingkan beberapa negara Asean lainnya yaitu salah satunya lebih rendah dari Singapura yaitu sebesar 91,09% dengan selisih 59,09 poin. Bahkan APK Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Thailand sebesar 42,29% dan juga Malaysia sebesar 43,00%. Demi meningkatkan Angka Partisipasi Kasar perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah harus berkomitmen untuk memenuhi hak dalam mendapatkan pendidikan tinggi secara merata sebagai wujud jaminan terhadap masyarakat (Mustaufa, 2023).

Dalam meningkatkan minat dan angka partisipasi melanjutkan pendidikan tinggi, pemerintah negara Indonesia menciptakan suatu solusi yaitu pemberian bantuan biaya pendidikan melalui beasiswa pendidikan secara gratis kepada mahasiswa (Syarif, 2020). Selaras dengan hal tersebut, pemerintah yang berwenang merancang kebijakan pendidikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 12 (1.d), mengamanahkan bahwa:

"Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya."

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, di dalam Pasal 76 Ayat (2) juga jelas mengamanahkan tentang pemenuhan hak mahasiswa yaitu:

"Hak mahasiswa yaitu pemerintah harus memberikan (a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; (b) bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau (c) pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan."

Pemerintah Indonesia secara aktif menyelenggarakan berbagai program beasiswa, termasuk Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) yang merupakan kolaborasi Kementerian Keuangan dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dari Kemendikbud Ristek, Beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan, dan Beasiswa S2 dari Kemenkominfo. Selain itu, program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka (KIP-K Merdeka) mendukung pelajar unggul dari keluarga ekonomi terbatas yang berkeinginan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Peran sektor swasta juga turut serta menyediakan beasiswa melalui perusahaan-perusahaan besar seperti Astra, BCA, CIMB Niaga, FIF Group,

Paragon, dan Perintis, bagi calon mahasiswa berprestasi dan membutuhkan dukungan finansial (Salam & Arif, 2024).

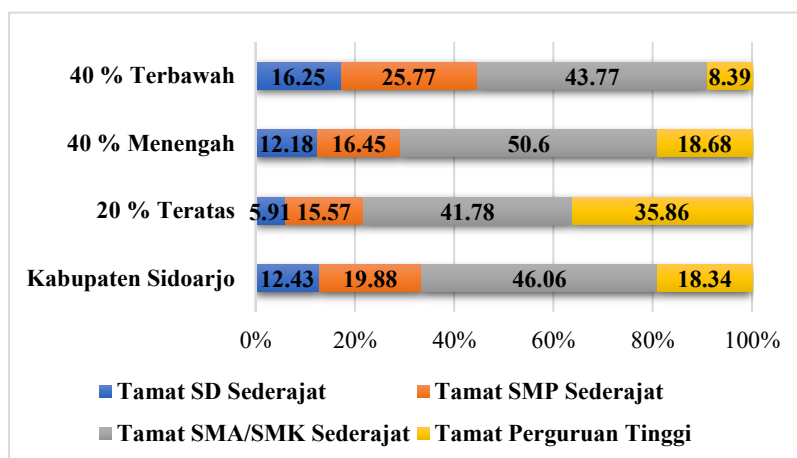
Pendidikan merupakan aspek pemerintahan bersifat konkuren yang dibagi antara tingkat pemerintah pusat dan tingkat pemerintah daerah, sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk merancang kebijakan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan di wilayah tersebut (Anggraini et al., 2024). Kewenangan pengelolaan, perencanaan dan pembiayaan pendidikan melalui desentralisasi diserahkan kepada pemerintah daerah, bertujuan mendekatkan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan pendidikan (Nurul Haliza et al., 2025). Hal tersebut diterapkan dengan adanya beasiswa pemerintah daerah kabupaten atau kota.

Seorang ahli kebijakan publik yaitu Dr. Fahlesa Munabari dalam Munabari (2020), berpendapat bahwa beasiswa daerah merupakan investasi strategis untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul di tingkat lokal. Dengan memberikan kesempatan pendidikan tinggi kepada putra-putri daerah, pemerintah kabupaten dapat mendorong mereka untuk kembali dan berkontribusi dalam pembangunan wilayahnya setelah lulus. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Dr. Suswanto, M.Si. sebagai pakar kebijakan pendidikan dalam Suswanto (2018), bahwa beasiswa dari pemerintah kabupaten dapat menjadi alat kebijakan yang efektif untuk mengatasi disparitas pendidikan antar wilayah. Dengan memberikan beasiswa kepada siswa berpotensi dari keluarga kurang mampu di daerah tertinggal

atau terpencil, pemerintah kabupaten dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi dan meminimalisir kesenjangan kualitas sumber daya manusia dengan daerah lain.

Program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah sangat berperan penting bagi pendidikan masyarakat, agar dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Oleh karena itu, Kabupaten Sidoarjo mengadakan program beasiswa pendidikan tinggi ini untuk menuntaskan kendala terkait beban biaya yang ditanggung mahasiswa asal Sidoarjo, sehingga dapat menempuh pendidikan tinggi tanpa keterbatasan biaya. Mayoritas masyarakat terkendala melanjutkan pendidikan akibat dari faktor ekonomi yang kurang baik. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi permasalahan kemiskinan yang merajalela menyebabkan kurang kemajuan serta pemerataan tingkat pendidikan. Kondisi ini telah dibuktikan oleh data tamatan menurut karakteristik dan pendidikan tertinggi bagi penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Sidoarjo.

Gambar 1. 3 Persentase Karakteristik dan Tamatan Pendidikan Tertinggi Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas di Sidoarjo Tahun 2024



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) (Diolah Oleh Penulis, 2025)

Data di atas membuktikan bahwa penduduk Kabupaten Sidoarjo berumur 15 tahun ke atas dengan kelompok pengeluaran terbawah atau tergolong penduduk miskin mayoritas menamatkan pendidikan pada jenjang SMA/SMK sederajat senilai 43,77%. Persentase tersebut disusul oleh tamatan SMP sederajat sebesar 25,77%, tamatan SD sederajat 16,25%, dan tamatan perguruan tinggi senilai 8,39%. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo menghambat untuk melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi yang menyebabkan kurangnya kualitas sumber daya manusia. Jika dibandingkan dengan beberapa kota atau kabupaten lain di Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo termasuk daerah yang tergolong rendah persentase penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi. Adapun data statistik kesejahteraan rakyat terkait penamatan pendidikan tinggi bagi penduduk berumur 15 tahun ke atas.

Tabel 1. 2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Menamatkan Pendidikan Tinggi Pada Kota/Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2024

No.	Kota/Kabupaten	Persentase Pendidikan Tinggi
1.	Kota Madiun	25,12 %
2.	Kota Surabaya	20,05 %
3.	Kabupaten Sidoarjo	18,34 %
4.	Kabupaten Pasuruan	16,55 %
5.	Kabupaten Gresik	11,39 %

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2024 (Diolah Oleh Penulis, 2025)

Tabel di atas sebagai bukti bahwa persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan tinggi di Kabupaten Sidoarjo masih tergolong

rendah yaitu sebesar 18,34%. Kota Surabaya sebagai daerah yang berdekatan dengan Kabupaten Sidoarjo memiliki persentase sebesar 20,05% selisih 1,71% lebih tinggi. Kemudian Kabupaten Pasuruan dengan selisih 1,79 % dan Kabupaten Gresik dengan selisih 6,95 % lebih rendah daripada Kabupaten Sidoarjo. Kota Madiun sebagai urutan pertama persentase tertinggi yaitu senilai 25,12% yang selisih 6,78% dengan Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi bagi masyarakat, mengingat kabupaten Sidoarjo ditunjang sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yaitu Gerbangkertosusilo. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyediakan program beasiswa pendidikan tinggi untuk mendukung mahasiswa asal Sidoarjo yang terkendala ekonomi dan mengapresiasi perolehan prestasi-prestasi baik akademik maupun non-akademik.

Selaras dengan ketentuan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di bab V pasal 12 yaitu:

"(1.c), peserta didik berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. (1.d) yaitu mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya."

Hal tersebut telah menjadi kewajiban pemerintah guna menyalurkan bantuan berupa beasiswa pendidikan tinggi untuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di tingkat perguruan tinggi.

Wujud komitmen pemerintah daerah memperkuat kualitas manusia melalui peningkatan akses pendidikan tinggi di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menargetkan 10.000 beasiswa pendidikan tinggi yang direalisasikan mulai tahun 2022 hingga 2026 mendatang. Program beasiswa pendidikan tinggi ini

ditujukan bagi para mahasiswa asal Kabupaten Sidoarjo yang memiliki prestasi keagamaan, prestasi akademik dalam negeri maupun luar negeri, prestasi non-akademik, dan untuk mahasiswa kurang mampu. Harapannya dengan pemberian beasiswa ini sebagai apresiasi kepada penerima agar semangat dan tekun selama menempuh masa studi, sehingga setelah selesai masa studi dapat berkontribusi dalam dunia kerja serta meningkatkan status sosial ekonomi keluarga.

Adapun tujuan pemberian beasiswa tercantum dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2024 Pasal 3 yaitu:

"Meminimalisir kemungkinan mahasiswa putus kuliah atau tidak melanjutkan pendidikan tinggi akibat persoalan biaya pendidikan tinggi, meningkatnya perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu, dan relevansi, meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing guna mendukung percepatan pembangunan manusia di Kabupaten Sidoarjo."

Program Beasiswa Pendidikan Tinggi ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di setiap tahunnya berkoordinasi dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Sidoarjo, dan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Mengingat pada setiap bidang beasiswa dikelola oleh dinas yang berbeda seperti, bidang prestasi keagamaan dikelola oleh Kesra Sekretariat Daerah, bidang prestasi akademik dan non-akademik dikelola oleh Disporapar, dan untuk Mahasiswa kurang mampu dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut guna mempercepat proses penyeleksian penerima beasiswa pendidikan tinggi, agar memperoleh hasil yang transparan dan tepat sasaran.

Gambar 1. 4 Beasiswa Pendidikan Tinggi Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Screenshoot dari Instagram Disporapar Sidoarjo

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat pendaftaran dan persyaratan beasiswa pendidikan tinggi, adapun persyaratan terdiri atas dua syarat yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan tersebut telah ditetapkan pada peraturan bupati, melalui persyaratan umum yaitu membuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai penduduk dari Kabupaten Sidoarjo dan terdaftar sebagai mahasiswa dari Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah, kartu identitas kemahasiswaan, dan surat tidak menerima beasiswa sejenis dari pihak manapun. Selain itu, terdapat persyaratan khusus di setiap bidang beasiswa yang harus dipenuhi oleh peserta pendaftar.

Persyaratan khusus seperti bidang keagamaan bagi muslim maupun non muslim dalam 4 tahun terakhir seperti, hafal minimal 10 (sepuluh) juz Al-Qur'an,

santriwan dan santriwati yang berkuliah dan menetap di pondok pesantren atau selaku pengajar ngaji di TPA/TPQ/Madin, dewan pengurus harian aktivis organisasi keagamaan. Bagi pendaftar beasiswa akademik dalam negeri dan luar negeri memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) atau sebutan lainnya, untuk bidang akademik dalam negeri dengan syarat IPK minimal 3,4 (tiga koma empat), sedangkan bagi bidang non akademik yaitu membuktikan melalui sertifikat, piagam, atau surat keterangan prestasi dalam kurun waktu empat 4 tahun terakhir. Pada bidang beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa dan diketahui oleh Kecamatan.

Setelah memenuhi persyaratan, pendaftar dapat mengisi formulir dan mengunggah dokumen persyaratan pada *link website* yang telah disediakan, kemudian menunggu penyeleksian secara *online* maupun *offline* dengan melibatkan dinas-dinas pengelola setiap bidang beasiswa. Pengumuman penerima beasiswa yang lolos seleksi akan disebarakan melalui media sosial instagram dan *website* Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penerima akan dihubungi melalui *WhatsApp* atau *e-mail* untuk bergabung dalam grup *WhatsApp* khusus penerima beasiswa sesuai dengan jalur penerimaan. Selanjutnya penerima akan diundang dalam acara peresmian beasiswa ditempat dan waktu yang telah ditentukan, dan menunggu pencairan dana melalui transfer ke rekening tabungan penerima.

Beasiswa Pendidikan Tinggi Kabupaten Sidoarjo diberikan bagi setiap mahasiswa penerima beasiswa dengan bantuan pendidikan sebesar 5 juta untuk beasiswa bidang prestasi keagamaan, bidang prestasi akademik dalam negeri dan

non-akademik, dan untuk mahasiswa kurang mampu. Berbeda dengan bidang lainnya, bagi mahasiswa penerima beasiswa bidang akademik luar negeri diberikan dana pendidikan sebesar 20 juta. Beasiswa ini sangat bermanfaat sebagai bantuan pendidikan mahasiswa selama menempuh perkuliahan, dengan adanya beasiswa ini menjadi acuan mahasiswa agar bersemangat dalam meningkatkan prestasi baik akademik, non akademik, maupun prestasi bidang keagamaan. Mahasiswa asal Kabupaten Sidoarjo yang kurang mampu dan berprestasi juga didukung sebagai penerima beasiswa ini, agar dapat meringankan biaya pendidikan.

Keberadaan Beasiswa Pendidikan Tinggi ini sangat berdampak bagi para mahasiswa penerima beasiswa, karena dapat memotivasi mahasiswa agar semangat menempuh pendidikan tinggi. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Yuli Kurniawati selaku penerima beasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang merasa sangat bersyukur mendapatkan beasiswa tersebut. Berikut pernyataan tersebut disampaikan Yuli dalam berita Republikjatim.com.

”Saya sangat senang dan bangga sudah diterima mendapat beasiswa dari Pemkab Sidoarjo.”

(Sumber: <https://republikjatim.com/news-11785-plt-bupati-sidoarjo-janji-tingkatkan-jumlah-penerima-beasiswa-pendidikan-bagi-mahasiswa>, diakses pada Senin, 30 September 2024).

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) ini juga merasa sangat terbantu dengan adanya beasiswa ini dapat meringankan biaya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Harapan dan ucapan terima kasih juga disampaikan oleh orang tua Yuli atas beasiswa dari Pemkab Sidoarjo. Berikut pernyataan tersebut disampaikan orang tua Yuli dalam berita Republikjatim.com.

”Kami berharap beasiswa ini terus berlanjut. Karena sangat membantu sekali dalam meringankan beban biaya kuliah.”

(Sumber: <https://republikjatim.com/news-11785-plt-bupati-sidoarjo-janji-tingkatkan-jumlah-penerima-beasiswa-pendidikan-bagi-mahasiswa>, diakses pada Senin, 30 September 2024).

Selain itu, terdapat pesan kesan dari mahasiswa penerima beasiswa pendidikan tinggi setelah prosesi penyerahan beasiswa oleh Plt. Bupati Sidoarjo, Bapak Subandi di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Tulangan Sidoarjo pada hari Rabu 4 September 2024. Pesan kesan yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa penerima beasiswa yaitu Aurel Devany Salsabila dari UPN "Veteran" Jawa Timur yang merasa senang dan bangga mendapatkan beasiswa ini. Berikut pernyataan tersebut disampaikan dalam unggahan Instagram @cakband1.

"Perasaan saya mendapatkan beasiswa Kabupaten Sidoarjo ini merasa senang dan sangat bangga karena kita juga bersaing dengan teman-teman yang lainnya, kemudian harapan saya dengan adanya program beasiswa Sidoarjo ini bisa terus berjalan bisa terus berkembang dan meningkatkan motivasi teman-teman untuk semangat belajar."
(Sumber: https://www.instagram.com/reel/C_hDRYOyziZ/?igsh=MWNubGlyMmFjb2l5cw==, diakses pada Kamis, 10 Oktober 2024).

Bapak Subandi selaku Plt. Bupati Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk terus menjalankan dan menambah kuota penerimaan beasiswa ini. Harapannya dapat membantu generasi muda Sidoarjo dalam meraih pendidikan yang lebih tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sidoarjo. Berikut pernyataan disampaikan dalam unggahan Instagram @cakband1.

"Bahwa beasiswa ini sangat penting dan sangat mendukung program pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo tentu terus kita tingkatkan. Ya Alhamdulillah dalam satu tahun 2000 lebih ini nanti akan kita naikan dua kali lipat."
(Sumber: <https://www.instagram.com/share/reel/BAKj8dZujq>, diakses pada Jum'at, 7 Maret 2025)

Tabel 1. 3 Pendaftar, Target, dan Realisasi Program Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Kabupaten Sidoarjo

Bidang Keagamaan			
Tahun	Pendaftar	Target	Realisasi
2022	295	500	216
2023	916	500	650
2024	916	500	500
Bidang Kurang Mampu			
Tahun	Pendaftar	Target	Realisasi
2022	900	500	500
2023	940	500	503
2024	974	500	503
Bidang Akademik & Non-Akademik			
Tahun	Realisasi		
	Dalam Negeri	Luar Negeri	Non-Akademik
2022	650	-	350
2023	682	-	318
2024	791	15	209

Sumber: Disporapar, Dinsos, Kesra Setda Sidoarjo (Diolah Oleh Penulis, 2025)

Tabel di atas sebagai bukti bahwa jumlah penerima program beasiswa pendidikan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang setiap tahunnya ditargetkan sekitar 2.000 penerima dari seluruh bidang beasiswa. Pada tahun 2022 sebanyak 1.716 penerima dari seluruh bidang. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 2.153 penerima dari dan tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 2.018 penerima dari seluruh bidang. Implementasi program beasiswa tahun 2022, jumlah penerima masih tergolong belum memenuhi target dikarenakan masih permulaan dan membutuhkan evaluasi atas penerapannya. Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024 jumlah penerima telah memenuhi target dan terus berkembang lebih baik dalam sistem penerapannya. Hal tersebut didukung oleh antusias

masyarakat dalam mengikuti program beasiswa ini, sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Selain itu, terdapat himbauan mengenai program beasiswa pendidikan tinggi, yaitu oleh Bambang Riyoko selaku Wakil Ketua DPRD Sidoarjo meminta agar dalam pengelolaan dana beasiswa dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran. Hal tersebut juga disampaikan Bambang Riyoko dalam berita Zonajatim.com, sebagai berikut:

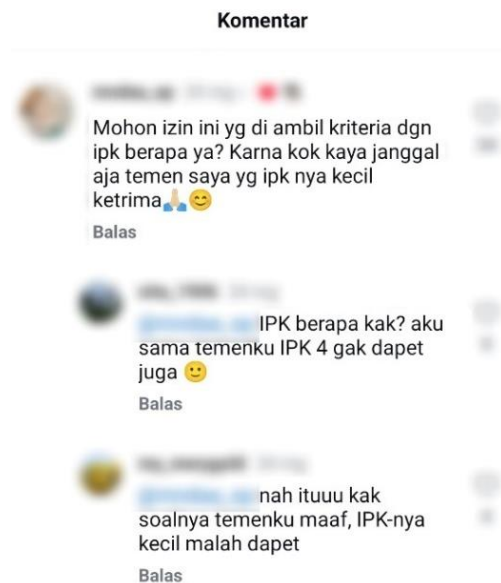
“Penyaluran program beasiswa Pemkab sebelumnya sudah cukup bagus. Hanya saja, ada beberapa hal yang tetap perlu dievaluasi dan diperbaiki. Yang jelas, saya minta transparansi dan harus tepat sasaran. Dibentuknya tim Pengawas ini tujuannya, untuk meminimalisir adanya keluhan masyarakat utamanya para calon penerima bantuan.”
(Sumber: <https://zonajatim.com/2024/05/21/dewan-minta-transparansi-seleksi-penerimaan-beasiswa-mahasiswa-jalur-prestasi-akademik/>, diakses pada Minggu, 20 Oktober 2024).

Bambang Riyoko menegaskan, untuk pengawasan dan transparansi pengelolaan dana tersebut, dirinya mendorong Pemkab membentuk tim pengawas secara independen. Hal tersebut agar pelaksanaan bantuan yang direalisasikan tidak keluar dari tujuan yang diharapkan dan juga guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan terkait penggunaan anggaran untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Sidoarjo

Meskipun begitu, terdapat permasalahan dalam implementasi program beasiswa pendidikan tinggi yang telah dijalankan selama 3 tahun terakhir. Permasalahan yang terjadi ialah terkait adanya ketidaksesuaian antara kriteria nilai pendaftar beasiswa dengan temuan nilai mahasiswa yang lolos penerimaan program beasiswa pendidikan tinggi Kabupaten Sidoarjo dalam bidang prestasi akademik dalam negeri. Berikut ini disampaikan pada kolom komentar unggahan

pengumuman program beasiswa pendidikan tinggi Kabupaten Sidoarjo pada akun Instagram *@cakband1*.

Gambar 1. 5 Keluhanan Pendaftar Beasiswa



Sumber: Screenshoot dari Instagram *@cakband1*

Pada komentar di atas membuktikan bahwa terdapat pendaftar yang memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) senilai 4,00 namun dinyatakan belum lolos dalam penyeleksian penerimaan program beasiswa pendidikan tinggi. Hal tersebut berlaku sebaliknya dengan pendaftar yang memiliki nilai IPK dibawah rata-rata ketentuan yang dinyatakan diterima program beasiswa pendidikan tinggi. Selain itu, juga terdapat keluhan dari pendaftar beasiswa pendidikan tinggi di bidang prestasi non-akademik pada kolom komentar unggahan pengumuman program beasiswa pendidikan tinggi Kabupaten Sidoarjo pada akun Instagram *@cakband1* berikut ini.

Gambar 1. 6 Keluhanan Pendaftar Beasiswa



Sumber: Screenshoot dari Instagram @cakband1

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat mahasiswa yang telah dua kali mendaftar beasiswa pendidikan tinggi Kabupaten Sidoarjo di bidang prestasi non-akademik dengan menyertakan sertifikat prestasi sesuai persyaratan yaitu berupa sertifikat prestasi tingkat provinsi, namun dinyatakan belum lolos dalam seleksi penerimaan beasiswa tersebut. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pendaftar yang menyertakan sertifikat prestasi di tingkat kecamatan dinyatakan lolos penyeleksian penerima beasiswa pendidikan tinggi. Selanjutnya, peneliti melakukan konfirmasi terkait keluhan tersebut dengan melakukan wawancara bersama Bapak Eko selaku kepala bidang kepemudaan untuk wawancara pra penelitian pada tanggal 5 Februari 2025:

”Kriteria selain IPK ada akreditasi perguruan tinggi, kemudian yang kedua yang berkuliah di Kabupaten Sidoarjo itu mendapatkan tambahan nilai namanya afirmasi terus dari tim yang lintas opd kita membuat juknis itu kita berpatokan pada yang bisa mendaftar adalah yang semester 3 sampai

semester 7. Jadi batasan ini karena di tahun 2023 kemarin itu ada audit dengan tujuan tertentu dari inspektorat bahwa perlu ada batasan. Nggak mesti dengan ipk 4 dia lolos, mungkin karna dia masih semester 1. Tidak ada ketentuan persyaratan karna itu muncul ketika rapat internal untuk tim.”

Wawancara pra penelitian di atas menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi pada beasiswa ini yaitu belum adanya pernyataan secara eksplisit terkait kriteria lain pada ketentuan persyaratan pendaftaran beasiswa maupun peraturan yang berlaku. Terdapat kriteria lain seperti batasan semester yang belum tercantum pada peraturan berlaku serta persyaratan yang telah disebarkan, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara peraturan serta persyaratan berlaku dengan kenyataan penerapannya. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan dalam penyaluran beasiswa yang menjadi permasalahan baik dari pendaftaran, persyaratan dan juga penyeleksian.

Permasalahan penelitian ini hampir sama dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Salam dan Arif (2024) dalam artikel jurnal berjudul *Implementation of the Pemuda Tangguh Scholarship Program for Students in Supporting Education in Surabaya City*. Pada artikel tersebut terdapat permasalahan ketidaksesuaian antara persyaratan yang tertera dalam peraturan dengan pamflet yang didistribusikan oleh Disbudporapar Kota Surabaya selaku pelaksana program beasiswa pemuda tangguh di Kota Surabaya. Oleh karena itu, menimbulkan ketidaksesuaian antara peraturan serta persyaratan berlaku dengan kenyataan kriteria yang diterapkan.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan di atas, penulis melihat proses implementasi program beasiswa pendidikan tinggi di Kabupaten Sidoarjo. Maka

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, menghasilkan rumusan masalah penelitian yaitu ”Bagaimana Implementasi Program Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah di atas, menghasilkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi program beasiswa pendidikan tinggi bagi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini, telah disampaikan bahwa penulis memiliki pandangan mengenai manfaat yang didapatkan melalui penulisan penelitian ini. Manfaat penelitian tersebut diantaranya:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai implementasi program Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial Budaya dan

Politik, serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang implementasi program Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

2. Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca yaitu dapat memberikan berbagai pengetahuan tambahan secara luas mengenai manfaat dari topik yang telah dibahas oleh penulis.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Manfaat bagi universitas yaitu untuk memperluas referensi dan literatur di perpustakaan yang dapat dimanfaatkan sebagai studi literatur penelitian yang akan dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

4. Bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Manfaat bagi Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai sumber acuan untuk meningkatkan wawasan tentang pelaksanaan program Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.